

ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK MOBIL TIPE LOW COST GREEN CAR (LCGC) TERHADAP PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI JAWA TIMUR TAHUN 2010-2014

Nurul Karunia Sari¹,

Alumni Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Meiril Hardi²

Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

meirilhardi@untag-sby.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine the magnitude of the contribution of the Low Cost Green Car type car tax to the tax revenue of Motorized Vehicles. Data Sources This study was obtained from interview and observation data (primary) and the target data and the realization of the East Java (Secondary) motorized vehicle tax. quantitative approach and descriptive data analysis method. The results of the analysis show that the contribution of the Low Cost Green Car car tax to the motor vehicle tax is still relatively small. In the second year its production increased by 200%. wagon jeep. Percentage of the level of effectiveness of motor vehicle tax from year to year has increased but has decreased in 2014.

Keywords: Effectiveness, Contribution, Low cost green car, Motor vehicle tax, Local original income

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak mobil tipe Low Cost Green Car terhadap penerimaan pajak Kendaraan Bermotor .Sumber Data Penelitian ini diperoleh dari data wawancara dan observasi (primer) dan data target dan realisasi pajak kendaraan bermotor Jawa Timur (Sekunder) .Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode analisis data deskriptif . Hasil analisis menunjukkan bahwa kontribusi pajak mobil Low Cost Green Car terhadap pajak kendaraan bermotor masih tergolong kecil .Pada tahun kedua produksinya meningkat sebesar 200% .Pencatatan pajak mobil tipe Low Cost Green Car dalam realisasi penerimaan asli daerah dimasukkan ke dalam gabungan pajak jenis mobil sedan station wagon jeep .Persentase tingkat efektifitas pajak kendaraan bermotor dari tahun ke tahun semakin meningkat tetapi terjadi penurunan pada tahun 2014.

Kata Kunci : Efektifitas ,Kontribusi ,Low cost green car ,Pajak kendaraan bermotor , Pendapatan asli daerah.

1. PENDAHULUAN

Seiring meningkatnya perekonomian masyarakat Jawa Timur dan berkembangnya daerah – daerah besar di Kota/Kabupaten di Jawa Timur, Mempengaruhi Kebutuhan masyarakat akan moda transportasi darat untuk menjangkau satu lokasi ke lokasi lain semakin meningkat. Salah satu moda yang dibutuhkan yaitu kendaraan roda empat. Penjualan kendaraan roda empat di Jawa Timur khususnya di kota Surabaya mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Dalam kebijakan industri nasional, industri alat transportasi merupakan salah satu sub-sektor yang diprioritaskan untuk dikembangkan, sehingga diperlukan adanya kebijakan yang kondusif. Kementerian Perindustrian telah menerbitkan kebijakan mengenai mobil murah dan ramah lingkungan atau Low Cost Green Car (LCGC). Kebijakan ini tentunya akan menumbuhkan minat dan daya beli masyarakat dalam berbagai lapisan kelas ekonomi termasuk ekonomi kelas bawah, mengingat hingga kini masih ada anggapan bahwa hanya masyarakat lapisan ekonomi kelas menengah ke atas yang dapat menggunakan mobil pribadi. Dengan adanya peraturan pemerintah mengenai mobil Low Cost Green Car (LCGC), Produsen mobil akan berlomba - lomba untuk mengeluarkan produk sesuai standar yang dikeluarkan pemerintah, mengingat pangsa pasar mobil ini sangat luas dengan mencakup seluruh lapisan masyarakat dari ekonomi kelas atas sampai ekonomi kelas bawah.

Fakta di Lapangan menunjukkan bahwa saat ini produk mobil Low Cost Green Car (LCGC) telah menjadi salah satu favorit masyarakat untuk berpergian, sehingga membuat keberadaan mobil – mobil ini semakin marak ditemukan di jalan Raya. Hal ini secara tidak langsung akan membuka peluang bagi pemerintah untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor Pajak Kendaraan Bermotor. Berdasarkan fenomena dan situasi yang terjadi, penelitian ingin melihat seberapa besar kontribusi pajak yang diterima dari pertumbuhan mobil tipe Low Cost Green Car (LCGC) terhadap pajak kendaraan Bermotor di Jawa Timur.

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kontribusi pajak mobil tipe LCGC terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Jawa Timur.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Hukum Mobil Low Cost Green Car

Mobil murah atau Low Cost Green Car (LCGC) adalah mobil yang diciptakan dengan konsep ramah lingkungan dan juga murah dalam operasionalnya. Mobil murah atau Low Cost Green Car (LCGC) di atur dalam payung hukum Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 mengenai produksi mobil Low Cost Green Car (LCGC), telah di keluarkan beberapa dasar hukum mengenai mobil murah dan ada beberapa persyaratan suatu mobil dikatakan sebagai mobil LCGC di antaranya sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 tentang Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah berupa Kendaraan Bermotor yang dikenakan pajak Penjualan atas Barang Mewah, termasuk LCGC, program Low Carbon emission, mobil listrik dan hybrid biodiesel
2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pengembangan Produksi Kendaraan Bermotor Roda Empat yang Hemat Energi dan Harga Terjangkau.
3. Mobil LCGC lebih hemat energi / lebih efisien dibandingkan jenis mobil yang lain dalam hal konsumsi bahan bakar, yaitu kisaran 20 km/liter dan mempunyai spesifikasi mesin maksimal antara bensin dan solar. mobil bensin mempunyai spesifikasi mesin maksimal 1200 cc, minimal 1 liter BBM untuk 20 KM dan Mobil solar maksimum 1500 cc minimal

1 liter BBM untuk 20 KM .Selain ramah terhadap isi kantong juga ramah terhadap lingkungan karena semakin sedikit mengeluarkan emisi bahan bakar dengan jarak tempuh lebih jauh .

4. Rata – rata harga mobil LCGC di Indonesia lebih terjangkau berkisaran antara Rp.75.000.000 s.d Rp.100.000.000 ini sangat jauh lebih murah bila dibandingkan dengan mobil MPV yang harganya berkisaran antara Rp .160.000.000 s.d Rp .250.000.000
5. Banyak mobil LCGC di Negara – Negara lain yang serupa sehingga LCGC di Indonesia harus menggunakan logo yang mencerminkan Indonesia .

Pendapatan Asli Daerah

Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Mardiasmo(2011:1) PAD adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah ,hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ,dan lain – lain pendapatan asli daerah yang sah .

PAD adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber – sumber pendapatan daerah dan dikelola oleh pemerintah daerah sehingga menjadi tulang punggung pembiayaan daerah .Tuntutan Peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada daerah itu sendiri.

Dalam penggalan dan peningkatan pendapatan daerah itu sendiri banyak permasalahan yang ditemukan ,menurut Tunggal (1999:67) hal ini dapat disebabkan oleh hal – hal sebagai berikut .

- a. Perannya yang tergolong kecil dalam total penerimaan daerah sebagian besar penerimaan daerah masih berasal dari bantuan pusat .Dari segi upaya pemungutan pajak ,banyak bantuan dan subsidi ini mengurangi usaha daerah dalam pemungutan PAD nya dan lebih mengandalkan kemampuan negosiasi daerah terhadap pusat untuk memperoleh tambahan bantuan .
- b. Kemampuan administrasi pemungutan di daerah yang masih rendah Hal ini mengakibatkan pemungutan pajak cenderung dibebani oleh biaya pungut yang besar.
- c. Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah hal ini mengakibatkan kebocoran – kebocoran yang sangat berarti bagi daerah .

Menurut Undang –Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa :

“PAD adalah Pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah ,hasil retribusi daerah ,hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ,dan lain – lain PAD yang sah ,yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi “

Pada pasal 6 Undang –Undang tersebut juga tercantum sumber – sumber PAD yang terdiri dari :

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ,dan
4. Lain – lain PAD yang sah

Salah satu sumber pembiayaan tersebut diharapkan dari penerimaan daerah yang di atur dalam pasal 157 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang penerimaan yang terdiri dari sebagai berikut .

1 .Pendapatan Asli Daerah

- a. Hasil pajak Daerah

- b. Hasil Retribusi Daerah
- c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan ,dan
- d. Lain – lain pendapatan daerah yang sah

2. Dana Perimbangan

- a. Pinjaman Daerah ,dan
- b. Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah

3. KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

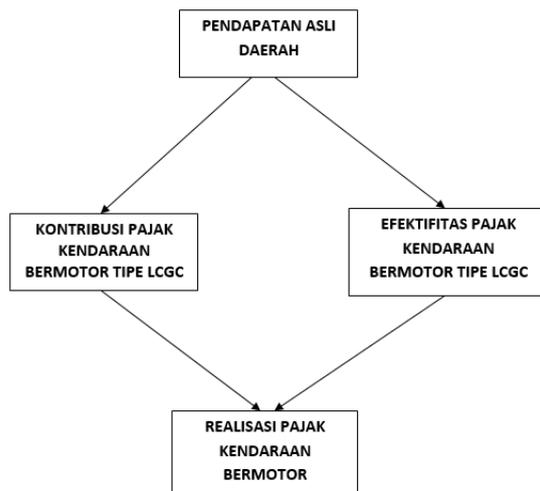
Kerangka Konseptual

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. PAD merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang dapat diberikan oleh PAD terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh PAD terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat. Salah satu sumber dari pendapatan asli daerah adalah pajak daerah

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber penerimaan pajak daerah yang mempunyai potensi dikarenakan pertumbuhan kendaraan bermotor yang kian hari bertambah sehingga pelaksanaan dan pemungutannya harus diperhatikan agar penerimaan pajak yang diperoleh menggambarkan potensi yang ada di daerah itu.

Mobil Low Cost Green Car sebagai salah satu objek pajak kendaraan bermotor yang pertumbuhan kian meningkat sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pengembangan Produksi Kendaraan Bermotor Roda Empat yang Hemat Energi dan Harga Terjangkau (KBH2) atau Low Cost and Green Car (LCGC) menjadi salah satu potensi bagi provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan pendapatannya di sektor pajak kendaraan bermotor.

Untuk mengukur potensi pajak kendaraan tipe LCGC yang ada, maka diawal perlu diperbandingkan antara jumlah kendaraan bermotor tipe LCGC yang terdaftar dengan total seluruh kendaraan bermotor roda empat yang terdaftar. Setelah mendapat potensi dari kendaraan LCGC, maka kita dapat menghitung perbandingan pajak Mobil LCGC yang telah terbayarkan dengan total pajak kendaraan bermotor yang telah terbayarkan untuk melihat berapa besar kontribusi yang disumbangkan oleh mobil-mobil tipe LCGC. Setelah mendapatkan hasil perhitungan, maka dapat LCGC yang dihitung berdasarkan realisasi penerimaan dengan besarnya potensi yang ada. Dari uraian diatas, maka dapat digambarkan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut.



4. METODOLOGI PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis data kuantitatif dan jenis penelitian ini jika ditinjau dari tujuan dan sifatnya adalah penelitian deskriptif. Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang karakteristik yang menggambarkan aspek - aspek yang relevan dengan fenomena yang menjadi focus permasalahan dari perspektif seseorang, organisasi atau lainnya (Sekaran , 2013 :97) .

Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan tentang Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mobil tipe LCGC terhadap Pajak Kendaraan Bermotor serta potensi dan realisasi PKB periode 2010 - 2014.

Tempat dan Waktu

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Surabaya Timur.yang berada di Jl. Manyar Kertoarjo No.1, Manyar Sabrangan, Mulyorejo, Kota SBY , Jawa Timur. Lokasi ini dipilih karena merupakan sumber data maupun informasi yang dibutuhkan serta menjadi ruang lingkup peneliti dalam melakukan penelitian .Penelitian ini berlangsung sejak bulan Juni sampai bulan Juli Tahun 2016.

Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini ,peneliti menggunakan dua jenis data ,yaitu sebagai berikut.

1. Data Kualitatif adalah hasil pengamatan yang berbentuk katagori dan bukan bilangan (Sekaran ,2013:113).Dalam penelitian ini data kualitatifnya berupa dokumentasi dan hasil wawancara terhadap objek penelitian.
2. Data kuantitatif adalah hasil pengamatan yang di ukur dalam skala numerik (bilangan) (Sekaran, 2013:113). Data kuantitatif berupa data tarif pajak kendaraan bermotor dan data jumlah kendaraan bermotor Jawa Timur.

Dalam penelitian ini juga, peneliti menggunakan sumber data, yaitu data sekunder yang diperoleh berdasarkan hasil dokumentasi yang di lakukan oleh objek penelitian maupun dari pihak lain yang memiliki relevansi dengan penelitian yang di lakukan. Data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari DISPENDA Jawa Timur .

Jenis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Timur.
2. Data Pajak Kendaraan Bermotor di Jawa Timur.
3. Data kendaraan bermotor yang ada di Jawa Timur.
4. Data lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

Populasi dan sampel

Populasi adalah kumpulan dari individu dengan kualitas serta ciri yang telah ditetapkan, Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi. Sampel adalah dimana hanya sebagian dari populasi saja yang diambil dan digunakan untuk menentukan sifat serta ciri yang dikehendaki oleh populasi. Populasi yang digunakan di penelitian ini adalah karyawan DISPENDA Jawa Timur.

Teknik Pengambilan Data

Teknik pengambilan data dengan cara menggunakan data sekunder yang di peroleh dengan mempelajari literature - literatur yang berkaitan dengan topik yang di pilih, wawancara dengan pihak DISPENDA untuk memperoleh data Primer tentang Potensi Mobil Tipe LCGC sebagai salah satu sumber pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor dan mengumpulkan data dengan menggunakan dokumentasi dari Dinas Pendapantan Daerah Surabaya Timur .

Definisi Variabel dan Definisi Operasional

Definisi Variabel

Variabel adalah suatu yang bersikap berubah – ubah dan tidak tetap / nilai yang banyak varian (bernilai banyak). Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan maka variabel-variabel yang dianalisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. LCGC (*Tipe Low Cost Green Car*)

LCGC (*Tipe Low Cost Green Car*) adalah mobil murah atau mobil ramah lingkungan atau kendaraan emisi karbon rendah dan berperan pada perekonomian bangsa karena mobil LCGC mereka juga terkena pajak

2. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor adalah **Pajak Kendaraan Bermotor** atau yang biasa dikenal dengan PKB (Pajak kendaraan bermotor) merupakan pajak terhadap kepemilikan ataupun penguasaan kendaraan bermotor baik kendaraan bermotor roda dua atau lebih dan beserta gandengannya yang dipergunakan pada seluruh jenis jalan darat serta digerakkan oleh peralatan tehnik yang berupa motor atau peralatan yang lain yang berfungsi merubah sumber daya energi menjadi sebuah tenaga gerak pada kendaraan bermotor yg bersangkutan, termasuk alat alat besar yang bisa bergerak.

Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah segala sesuatu yang menjadi pengamatan dalam penelitian yang didasarkan atas sifat penelitian atau hal-hal yang dapat didefinisikan, diamati, dan diobservasikan.

Pengaruh Kontribusi Pajak mobil Tipe Low Cost Green Car Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Jawa Timur ini bisa sangat besar kontribusinya dalam membiayai kebutuhan belanja Negara ,pembangunan nasional dan untuk meningkatkan pendapatannya di sektor pajak kendaraan bermotor.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh informasi dan data yang dikelola dalam penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara, yaitu sebagai berikut.

1. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dengan mempelajari literatur-literatur yang berkaitan dengan topik yang dipilih.

2. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian Untuk memperoleh data, maka peneliti mengadakan penelitian ke Kantor Dinas Pendapatan Daerah Jawa Timur dengan melakukan hal-hal sebagai berikut.

a. Wawancara (*interview*)

Merupakan suatu tanya jawab langsung kepada informan yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data primer dan informasi yang diperlukan.

b. Dokumentasi (*documentation*)

Merupakan suatu pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi dari Dinas Pendapatan Daerah Jawa Timur.

Model Analisis

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu suatu sistem pemikiran atau suatu metode peninjauan yang berusaha menggambarkan dan menyajikan keadaan pada saat penelitian berlangsung. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan tentang Potensi Mobil Tipe LCGC sebagai salah satu sumber pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Mobil Low Cost Green Car sebagai salah satu objek pajak kendaraan bermotor yang pertumbuhan penjualan dan peredarannya kian meningkat sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pengembangan Produksi Kendaraan Bermotor Roda Empat yang Hemat Energi dan Harga Terjangkau (KBH2) atau Low Cost and Green Car (LCGC). Hal tersebut menjadikan mobil LCGC sebagai salah satu potensi bagi Jawa Timur untuk meningkatkan pendapatan di sektor pajak kendaraan bermotor.

Untuk mengukur potensi pajak kendaraan tipe LCGC yang ada, maka dicari jumlah perbandingan antara kendaraan bermotor tipe LCGC yang terdaftar dengan total seluruh kendaraan bermotor roda empat yang terdaftar.

Setelah mendapat potensi dari kendaraan LCGC, maka kemudian dapat diukur potensi Pajak Kendaraan Bermotor Mobil LCGC yang ada dengan menghitung berapa besar kontribusi pajak yang disumbangkan oleh mobil-mobil tipe.

Untuk melihat perilaku kontribusi PKB mobil tipe LCGC terhadap pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Timur selama periode tahun 2010-2014, berikut rumus yang digunakan.

1. Y adalah persentase kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor tipe LCGC terhadap pendapatan PKB pada masing-masing tahun analisis.
2. PKB Tipe LCGC adalah Pajak Kendaraan dari mobil tipe LCGC.
3. Total PKB adalah total pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor.

Sedangkan untuk seberapa besar efektifitas Pajak Kendaraan Bermotor ini dibayarkan.

Ukuran efektifitas biasanya dinyatakan secara kualitatif dalam bentuk pernyataan. Tingkat efektifitas dapat digolongkan menjadi:

1. hasil perbandingan tingkat pencapaian $> 100\%$ berarti sangat efektif
2. hasil perbandingan tingkat pencapaian $= 100\%$ berarti efektif
3. hasil perbandingan tingkat pencapaian $< 100\%$ berarti tidak efektif

Proses Pengolahan Data

1. Editing

Yaitu proses pengolahan data dengan mengambil data terpenting yang berhubungan dengan permasalahan.

2. Tabulating

Yaitu proses penyusunan data yang dimasukkan, data yang telah diperoleh dalam bentuk table atau daftar sehingga data tersebut dapat dibaca dan dipahami dengan mudah.

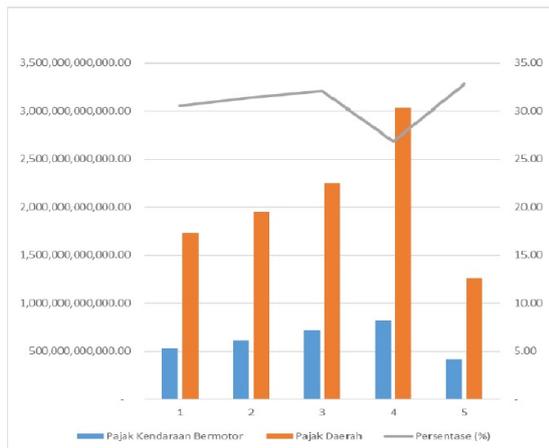
5. ANALISIS DATA

Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Mobil Tipe Low Cost Green Car (LCGC) Di Jawa Timur

Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum Aturan Mobil LCGC Diberlakukan

Berdasarkan data yang telah diperoleh ,penelitian mencoba memberikan suatu penguatan tentang hubungan antara Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Daerah Provinsi Jawa Timur Serta Kontribusinya ke dalam gambar berikut.

Gambar 4.4 Hubungan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Daerah provinsi Jawa Timur.



Pada Gambar di atas menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Daerah meningkat sering dengan meningkatnya penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang memiliki kontribusi terhadap Pajak Daerah berkisar 30% hingga 32% tiap tahunnya. Pada periode 2011 hingga 2013, pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor selalu menunjukkan trend yang positif sesuai alur grafik pada gambar. Di tahun 2012 sendiri, pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 16% dari tahun sebelumnya. Hal tersebut juga terjadi di tahun 2013 dengan adanya kenaikan pertumbuhan sebesar 18% dari tahun 2012. Untuk tahun 2014, terjadi penurunan alur disebabkan karena kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor turun 27% atau pertumbuhannya yang menjadi 13%. Dengan pertumbuhan tersebut, penelitian menghitung besaran realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor berdasarkan kontribusi dari mobil – mobil LCGC yang terdaftar dan terbayarkan.

Tabel 5.4 menunjukkan perhitungan dari realisasi dan kontribusi tahun 2010 dan 2014. Sebelum berlakunya peraturan tentang produksi LCGC, kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor telah didominasi oleh objek yang berasal dari mobil – mobil jenis Station Wagon, Jeep, dan sedan dengan persentase 41,25% di tahun 2010 dan 43,38% di tahun 2011 dan 45,58% di tahun 2012 dari Pajak Kendaraan Bermotor di Surabaya Timur. Hal ini berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam pengelompokan kode rekening Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Surabaya Timur.

Pajak Kendaraan Bermotor Setelah Aturan Mobil LCGC Diberlakukan

Pada tahun 2013, aturan produksi mobil LCGC dikeluarkan. Mobil jenis ini terdiri dari enam varian dari lima merk produsen yang ada di Indonesia. Menghitung besaran kontribusi mobil – mobil tipe LCGC berdasarkan periode tahun 2013 hingga tahun 2015 dilampirkan ke dalam Tabel 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, dan 5.9 dengan menggunakan rumus yang ada pada Tabel 3.2.

Keterangan tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) diperoleh berdasarkan harga yang diberikannya oleh dealer produsen mobil dan diketahui oleh pihak DISPENDA Surabaya Timur. Sedangkan Bobot diberikan berdasarkan Peraturan Daerah Surabaya Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Untuk tarif pajaknya disesuaikan dengan keterangan kepemilikan kendaraan bermotor yang diperoleh dari data Dinas Pendapatan Daerah Surabaya Timur.

Berdasarkan hasil pengalaman dan perhitungan dari data sekunder yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Surabaya Timur Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015, maka peneliti mendapatkan hasil bahwa kontribusi pajak mobil LCGC terhadap Pajak Daerah, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor, mengalami kenaikan tiap tahunnya. Setelah diterbitkannya peraturan yang mengatur tentang produksi dan penjualan mobil LCGC dikelompokkan ke

dalam kelompok mobil jenis Station Wagon –Minibus berdasarkan Standar ditentukan oleh pihak pemerintah melalui Dinas Pendapatan Daerah (Anggodo,2015).

Untuk Tahun 2012 ,Kendaraan mobil tipe LCGC belum terdaftar dikarenakan program LCGC mulai di terbitkan tahun 2013 sedangkan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Jenis Station Wagon ,Sedan dan Jeep sebesar Rp 329.409.527.658 .Di Tahun 2013 atau tahun pertama setelah peluncuran mobil - mobil LCGC,penerimaan pajak kendaraan mobil tipe LCGC menyumbang pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Sebesar Rp 2.066.899.500 dari total penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor jenis Station Wagon ,Sedan dan Jeep yang berjumlah sebesar Rp 202.621.658.628 atau dengan persentase kontribusi yang naik menjadi 1,02% .Untuk Tahun 2014 ,Penerimaan pajak kendaraan mobil tipe LCGC telah menyumbang pendapatan Pajak Kendaraan bermotor Sebesar Rp 6.457.276.000 dari total penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor jenis Station Wagon ,Sedan,dan Jeep Sebesar 380.690.106.600 atau dengan persentase kontribusi yang naik menjadi 1,70% .Kenaikan ini juga dipengaruhi karena telah diterapkannya peraturan pajak prosesif tentang kepemilikan kendaraan bermotor ke dalam pemungutan pajak mobil LCGC di Surabaya Timur sehingga tarif pengenaan pajaknya pun ikut meningkat .

Analisis Efektifitas Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Timur

Efektifitas adalah perbandingan antara realisasi penerimaan dengan target penerimaan ,dalam hal ini penelitian mengukur hubungan antara hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap target perubahan Pajak Kendaraan Bermotor

Efektifitas pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Sebagai Berikut.

1. Pada tahun 2010 target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan oleh pemerintah daerah sebesar Rp 2.100.000.000.000 dan realisasinya sebesar Rp 2.269.943.193.638 .Hal ini menandakan bahwa tingkat efektifitas pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 108,09% (Sangat Efektifitas)
2. Pada tahun 2011 target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di tetapkan oleh pemerintah daerah sebesar Rp 2.610.000.000.000 dan realisasinya sebesar Rp 2.692.582.635.332 .Hal ini menandakan bahwa tingkat efektifita pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 103,16% (Efektif)
3. Pada tahun 2012 target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di tetapkan oleh pemerintah daerah sebesar Rp 3.243.000.000.000 dan realisasi nya sebesar Rp 3.287.113.502.460 .Hal ini menandakan bahwa tingkat efektifitas pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 101,16 % (efektif)
4. Pada tahun 2013 target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di tetapkan oleh pemerintah daerah sebesar Rp 3.594.000.000.000 dan realisasinya sebesar Rp 4.309.073.589.585 .Hal ini menandakan bahwa tingkat efektifitas pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 108,41 % (Sangat Efektif)
5. Pada tahun 2014 target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di tetapkan oleh pemerintah daerah sebesar Rp 4.150.000.000.000 dan realisasinya sebesar Rp 3.896.189.871.560 .Hal ini menandakan bahwa tingkat efektifitas pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 103,83 % (Tidak Efektif)

Peningkatan target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berkisar 100 (seratus) miliar rupiah tiap tahunnya.sedangkan realisasi

penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor ,tahun 2014 ,jumlah yang diterima besarnya tidak terlalu signifikan apabila di bandingkan berdasar target yang ditetapkan .

Tingkat Efektifitas pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor sampai tahun 2014 ,menunjukkan situasi yang naik – turun namun dalam keadaan yang tidak terlalu signifikan .Pada tahun 2012 ,terjadi penurunan efektifitas dalam penerimaan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dibandingkan tahun 2011 sedangkan di tahun 2014 ,efektifitas realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor juga mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya .Namun kisaran persentasenya kurang dari 100 % sehingga masih dikatan efektif .

Kendala dan Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Kendala yang sering dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah Di provinsi Jawa Timur terkait pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada umumnya terjadi juga di berbagai Dispenda Provinsi di seluruh Indonesia .Hal ini sejalan dengan salah seorang pegawai di bidang Pajak Daerah .Candra (2016) yang mengatakan bahwa pada umumnya kendala – kendala yang dihadapi Dinas Pendapatan Daerah di Jawa Timur dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor kurang lebih sama dengan di daerah lain.Kendala – Kendala tersebut adalah sebagai berikut.

1. Kurangnya kesadaran dari Masyarakat untuk membayar pajak kendaraan mereka .
2. Maraknya kendaraan bermotor bernomor polisi di wilayah Surabaya timur sehingga potensi pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor tidak dapat dioptimalkan.
3. Keterbatasan dalam mensosialisasikan kewajiban membayar pajak Kendaraan Bermotor.
4. Kurang nya sarana dan tenaga yang mendukung kenyamanan para wajib pajak dalam aktivitas pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor .
5. Sistem dan Database yang masih jauh dari standar internasional sehingga masih terjadi error dalam pengelolaannya.
6. Lemahnya penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap kepatuhan membayar pajak .

Untuk meningkatkan efektifitas pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor ,Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melakukan berbagai upaya ,yaitu sebagai berikut.

1. Mulai melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui system online.
2. Membuat layanan unggulan Samsat ,Seperti
 - a. Drive Thru Samsat
 - b. Samsat Keliling ,dan
 - c. Sms info pajak
3. Melengkapi Sarana dan Penambahan jumlah personil pegawai Dinas Pendapatan Daerah untuk setiap UPTD .
4. Perbaiki system dan database Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur .

Melakukan pendapatan ulang kendaraan yang terdaftar dan terbayarkan di wilayah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur.

6. SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh ,peneliti mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut .

1. Jumlah Kendaraan Di Provinsi Jawa Timur ,khususnya roda empat mengalami peningkatan sehingga mempengaruhi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor .Selama

Periode sebelumnya diberlakukannya aturan mengenai mobil LCGC ,penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Ditahun 2010 sebesar Rp 2.269.943.193.638 dan di tahun 2011 sebesar Rp 2.692.582.635.332, dan di tahun 2012 sebesar Rp 3.287.113.502.460 .Setelah diberlakukannya aturan mengenai produksi mobil LCGC ,Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di tahun 2013 sebesar Rp 4.309.073.589.585 .untuk tahun 2014 ,Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp 3.896.189.871.560 .

2. Mobil- Mobil tipe LCGC memberikan kontribusi bagi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 1,02% pada tahun 2013 ,pada tahun 2014 sebesar 1,70% berdasarkan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor jenis golongan Station Wagon ,Sedan ,Jeep .
3. Efektifitas Pajak Kendaraan Bermotor periode 2010 – 2014 menunjukkan situasi yang fluktuatif namun dalam keadaan yang tidak terlalu signifikan ,Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Tahun 2010 sebesar 108,09 % dengan menunjukkan keterangan sangat efektif .Pada tahun 2011 mengalami penurunan menjadi 103 ,16 % yang menunjukkan efektif. Efektif tahun 2012 mengalami penurunan 101 ,36 % namun terjadi kenaikan di tahun 2013 menjadi 108,41% .Tahun 2014 menunjukkan penurunan sebesar 103,83% dari tahun berikutnya.

Saran

Setelah melakukan penelitian dan mendapatkan hasil yang sesuai dengan keinginan peneliti ,maka peneliti mencoba memberikan saran saran yang berhubungan tentang penelitian ini,diantaranya :

1. Standar ketentuan penggolongan jenis kendaraan oleh Dinas Pendapatan Daerah sebaiknya harus menggunakan standar internasional yang berlaku agar penyesuaian data kendaraan tidak tumpang – tindih satu sama lain .Selain itu standar yang jelas juga bakal mempengaruhi pemasukan dari Pajak Kendaraan Bermotor .
2. Mobil –Mobil tipe LCGC sebaiknya dibuatkan standar sendiri untuk penggolongan ke dalam jenis kendaraan oleh Dinas Pendapatan Daerah karena ketentuan produksi tipe LCGC telah di atur oleh pemerintah .
3. Penerapan aturan Pajak Kendaraan Bermotor agar terus disosialisasikan supaya pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor dapat dioptimalkan.
4. Untuk kendraan Bermotor yang memakai nomor polisi diluar nomor polisi daerah Surabaya Timur dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi . Hal ini berguna untuk memaksimalkan potensi pendapatan dari pajak kendraan Bermotor dan meminimalisir potensi pajak yang keluar dari wilayah surabaya timur .
5. Kekurangan – kekurangan dalam kegiatan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor agar segera dilakukan pembenahan serta perbaikan mengingat potensi pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor Sangat Besar bagi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur sehingga harus dioptimalkan .

Keterbatasan Penelitian

Evaluasi atas hasil penelitian ini harus mempertimbangkan keterbatasan yang mungkin mempengaruhi hasil penelitian ,di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Data Sekunder yang dibutuhkan sangat terbatas .
2. Data mengenai nilai kepemilikan kedua kendaraan mobil LCGC hanya menyantumkan 2 tipe mobil .
3. Lokasi penelitian yang hanya dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur. Penentuan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) mobil LCGC masih memakai harga pasaran tahun 2015 mengingat adanya rencana kenaikan harga di akhir tahun 2016.

DAFTAR PUSTAKA

- Apsari. 2013. Pengaruh Insentif Pajak BPNKB terhadap Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang Terdaftar Di Surabaya Timur. Surabaya
- Febriati. 2011. Analisis Sistem Pengendalian Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Peningkatan PAD pada Dispenda Kota Singkawang. Jurnal Eksos, Vol. 7, No. 2, Juli 2011, hlm. 165 – 185.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penghitungan Dasar PKB dan BBNKB. 2010. Surabaya: Departemen Dalam Negeri.
- Mardiasmo. 2010. Perpajakan. Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Mardiasmo. 2012. Perpajakan. Edisi Revisi 2013: Yogyakarta: Penerbit Andi
- P.J.P.Andiani Waluyo Perpajakan. Edisi Revisi (2011 :2). Yogyakarta: Penerbit angka
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.* Surabaya: Departemen Dalam Negeri.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 2007.* Surabaya: Departemen Keuangan.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 2004.* Surabaya: Departemen Dalam Negeri.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah 2004.* Surabaya: Departemen Keuangan.
- Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 1997.* Surabaya: Departemen Keuangan.
- Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2004.* Surabaya: Departemen Keuangan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2009.* Surabaya: Departemen Keuangan.
- Waluyo, B. dan Ilyas, Wirawan. 2010. Perpajakan Indonesia, Jakarta: Salemba Empat.*
- Hasannudin. dan Wokas, Heince. R. N. 2014. Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Maluku Utara. Manado: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Pendidikan Profesi Akuntansi Universitas Sam Ratulangi.
- Mahmudi. 2010. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen.
- Mayasari, Ella. 2008. Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Jawa Timur. Skripsi tidak diterbitkan. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Nadhia, Syarifah. 2012. Efektivitas Prosedur Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari Pajak Pusat ke Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang. Palembang
- Pedoman Penulisan Skripsi. 2012. Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Surabaya: Departemen Dalam Negeri.
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Surabaya: Departemen Dalam Negeri.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Surabaya: Departemen Dalam Negeri.

- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah, termasuk LCGC, Program Low Carbon Emission, Mobil Listrik, Hybrid Biodiesel. 2013. Surabaya: Pemerintah Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pengembangan Produksi Kendaraan Bermotor Roda Empat Yang Hemat Energi dan Harga Terjangkau (KBH2) atau Low Cost and Green Car (LCGC). 2013. Surabaya: Departemen Perindustrian.
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Intensif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi. 2010. Surabaya: Pemerintah Republik Indonesia.
- Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. 2010. Surabaya: Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur. 2009. Surabaya: Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 16 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur . 2011.Surabaya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- Profil Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur . 2014. Surabaya: Pemerintah Provinsi Jawa Timur.